

No : 448/Dir.BSD/04/2026  
Lamp : 1 (satu) bendel

Kalasan, 30 April 2026

Kepada Yth.  
Kepala DPP Perbarindo  
Komp Patra II No. 46  
Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

**Perihal : Pengiriman Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025. Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO pada tanggal 29 April 2026 (bukti terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan, harap menjadikan periksa dan atas segala bantuan, bimbingan serta pembinaan dari DPP Perbarindo, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Shinta Daya



Suitbertus Fajar Nugraha  
Direktur Utama

No : 449/Dir.BSD/04/2026  
Lamp : 1 (satu) bendel

Kalasan, 30 April 2026

Kepada Yth.  
Pimpinan Majalah Media BPR  
Di tempat

**Perihal : Pengiriman Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025**

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025. Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2025 telah dikirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui APOLO pada tanggal 29 April 2026 (bukti terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan, harap menjadikan periksa dan atas segala bantuan, bimbingan serta pembinaan dari DPP Perbarindo, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT BPR Shinta Daya



Suitbertus Fajar Nugraha  
Direktur Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

## PT Bank Perekonomian Rakyat Shinta Daya

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

1039442-1-LTBPRK-R-A-20251231-010201-600731-29042026124605

Periode Data

2025

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_shinta\_daya@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-04-29 12:46:05



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR SHINTA DAYA  
TAHUN 2025**



**Jl. Yogya-Solo Km. 15 Bogem, Tamanmartani Kalasan,  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571  
TELEPON: (0274) 496036, 496074**

## 1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR Shinta Daya
Alamat	Jl. Yogya - Solo km. 15 Bogem Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Nomor Telepon	(0274) 496036

### Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT. BPR Shinta Daya pada tahun 2025 telah membawa perkembangan BPR yang baik meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di tahun 2025 di tengah tingkat persaingan yang tinggi dan era digitalisasi serta kondisi perekonomian yang kurang baik yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Shinta Daya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Shinta Daya dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Shinta Daya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Shinta Daya.

BPR Shinta Daya telah beroperasi 55 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi Bank Terbaik dan Terpercaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat DIY dan Jateng.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Shinta Daya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di tahun 2025 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Shinta Daya terus berupaya untuk mewujudkan hal - hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

### Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	<b>2. Baik</b>
--	----------------

### Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR Shinta Daya telah melaksanakan pelaksanaan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen

BPR.

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Suitbertus Fajar Nugraha</b>
	<p><b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <p>Tanggung Jawab Direktur Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin dan mengelola PT BPR Shinta Daya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan serta Garis Besar Program yang telah disampaikan dan disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>2. Bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan kinerja Bank.</li> <li>3. Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan-kebijakan Bank.</li> <li>4. Bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan rencana, pengawasan, pengendalian operasional Bank.</li> <li>5. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi pembinaan dan pengelolaan kredit, dana, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional dan mobilisasi dana, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, serta meningkatkan citra positif Bank di masyarakat.</li> <li>6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li> </ol> <p>Rincian Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memprakarsai penyusunan program kerja dan rencana anggaran yang akan ditetapkan menjadi target yang akan dicapai oleh perusahaan.</li> <li>2. Mengevaluasi dan menganalisis perkembangan bank.</li> <li>3. Mengendalikan dan menentukan langkah-langkah pengawasan operasional bank.</li> <li>4. Memutus plafond kredit yang diusulkan oleh bagian terkait yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian.</li> <li>5. Meninjau kembali, meneliti, menilai dan menyetujui atau menolak permohonan kredit yang telah diproses dan dinilai bawahan (Account Officer, staf kredit SME, Kasi Kredit SME, Analis Kredit, Kasi Marketing wilayah, Kasubag Kredit Kabag Kredit, Pemimpin Cabang, Kepala Divisi Bisnis).</li> </ol>	
<b>2.</b>	<b>Nama</b>	<b>Johannes Bosco Herimahadi</b>
	<p><b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b></p> <p>Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional dalam hal mengamankan semua Keputusan dan Kebijakan Direksi, baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) atau melalui Surat Edaran (SE) lainnya serta Memo Direksi.</li> <li>2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.</li> <li>3. Menjamin terlaksananya rencana kerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit tugas dari tingkat Kepala Divisi sampai dengan pelaksana, melalui pengawasan dan evaluasi hierarkis yang dapat dikendalikan lewat jalur Struktur Organisasi.</li> <li>4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li> </ol>	

**Rincian Tugas**

1. Bersama- sama Direktur Utama dan Direktur Operasional mengambil langkah- langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
2. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.
3. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
4. Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
5. Memantau dan memastikan hasil pemeriksaan dari Audit Intern Bank, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuanagn dan/ atau otoritas dan lembaga lain telah ditindak lanjuti oleh bagian terkait berdasarkan prinsip kepatuhan.
7. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

3.

**Nama**

**Laurentia Dyah Widia**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

Tanggung Jawab Direktur Operasional :

1. Bersama- sama Direktur Utama dan Direktur Bisnis melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.
2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku
3. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi peningkatan kualitas administrasi kredit, administrasi/ pembukuan, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional, pengamanan data nasabah baik kredit maupun dana, serta memastikan keamanan dari segi hukum atas operasional Bank.
5. Mengusahakan berlangsungnya pemeliharaan dan perawatan atas semua asset perusahaan secara baik.
6. Mengusahakan agar pelayanan kepada nasabah berlangsung secara baik

Rincian Tugas :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan administrasi dan pelayanan perbankan.
2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengambil langkah- langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
3. Memonitor dan mengevaluasi serta mengusahakan agar likuiditas keuangan tetap dalam posisi aman dan sehat.
4. Menjaga semua asset perusahaan, baik asset lancar maupun berupa asset aktiva tetap dalam keadaan aman.
5. Mengawasi pembuatan perhitungan pajak atas semua pajak yang dibebankan kepada perusahaan.
6. Mengamankan/menyimpan kunci utama khasanah.
7. Memantau tingkat pelayanan dan citra Bank ditengah masyarakat serta mencari solusi apabila terdapat masalah yang berkaitan terhadap hal itu.

8. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
9. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:**

1. Sebelum dilakukan penghapusan akan dilakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah secara maksimal, dan kalau penghapusan dilaksanakan akan dipastikan terlebih dahulu prosedurnya sudah benar..
2. Akan dievaluasi terkait perubahan suku bunga kredit untuk meningkatkan NIM
3. MOU kredit Pegawai akan diperbarui dengan memperhatikan risiko dan mitigasinya.
4. Pemantauan akan terus dilakukan secara mingguan, baik dari AO maupun PKB
5. Pemisahan hasil dari PKB dan pelunasan, terutama denda dendanya, sehingga mudah mengevaluasi pendapatan team PKB.
6. Penyisihan akan di kembalikan ketika target tidak tercapai di akhir tahun.
7. Pelatihan - pelatihan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kompetensi SDM akan terus dijalankan
8. Pelatihan APU PPT & PPPSPM sudah dilaksanakan pada bulan Agustus
9. Penanganan kredit bermasalah, terutama kredit dengan nominal dibawah 5 jt terus dipantau, ditangani secara khusus dan dilaporkan perkembangannya. Sementara untuk kredit di perusahaan2 swasta, akan ditingkatkan untuk menambah NOA dengan tidak mengesampingkan mitigasi risikonya

**3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris**

<b>1.</b>	<b>Nama</b>	<b>Octavianus Sunyi Haryanto</b>
	<b>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</b>	
	Tanggung Jawab	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li> <li>2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.</li> <li>4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li> </ol>	
	Rincian Tugas	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.</li> <li>2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.</li> <li>3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.</li> <li>4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).</li> <li>5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).</li> <li>6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.</li> <li>9. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap</li> </ol>	

- penerapan program APU PPT dan PPPSPM
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
  11. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
  12. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
  13. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Nama

**Nicolous Ndaru Sunarwibowo**

**Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:**

**Tanggung Jawab**

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

**Rincian Tugas**

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
9. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM
10. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
11. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
12. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
13. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

1. Wacana Penghapusan buku kalau akan dilaksanakan, dipastikan prosedur prosedurnya sudah benar dan sudah dilakukan upaya yang maksimal.
2. MOU kredit Pegawai agar lebih memperhatikan risiko dan mitigasinya.
3. System dan secara manual harus sejalan sehingga perlu rekonsiliasi kesamaan keduanya.
4. Untuk pencapaian target, strategi yang diperlukan harus ditambah effort lebih dari

biasanya.

5. Penerapan perlakuan denda pada angsuran, disesuaikan dengan system MSO
6. Pendapatan secara cash basis, dipantau secara mingguan, baik dari AO maupun PKB. Sehingga diakhir bulan selisih perhitungan dengan system (secara rekonsiliasi) cepat ketemu.
7. Kekurangan koreksi provisi dan administrasi dilakukan dengan amortisasi juga.
8. Di Neraca pos Provisi dan Administrasi dipisah, karena ada perbedaan perlakuan. Administrasi tidak di amortisasi seperti provisi.
9. Perlu dipisahkan hasil dari PKB dan pelunasan, terutama denda dendanya, sehingga mudah mengevaluasi pendapatan team PKB.
10. Penyisihan di kembalikan ketika target tidak tercapai di akhir tahun.
11. Ukuran kontribusi karyawan non produktif yaitu dengan zero error, kecepatan melayani dan pemahaman produk.

#### 4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak ada

#### 5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak ada

#### 6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Persentase Kepemilikan (%)	8,17

##### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Persentase Kepemilikan (%)	9,06

#### 7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

##### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Nicolous Ndaru Sunarwibowo
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

#### Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak memiliki

### 8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

#### Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
----	------	----------------------------

Nama Bank/Perusahaan Lain	PT. BPR Shinta Bhakti Wedi
Persentase Kepemilikan (%)	3,98

### 9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

#### Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada hubungan keuangan dengan

	Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	anggota Dewan Komisaris lain
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

### Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Rudy Handoko
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
3.	Nama	Wilibrodus Rahadiyan Dewanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain

4.	Nama	Suitbertus Fajar Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
5.	Nama	Hery Wiratno P
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
6.	Nama	Naning Poedyaningsih
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
7.	Nama	Antonius Subekti
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
8.	Nama	Mateus Nugraha
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris

	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
9.	Nama	Bernadetta Ari Santi Handayani
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
10.	Nama	Christophorus Rinal Pudyantoro
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
11.	Nama	Alex Sukono, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
12.	Nama	Robertus Iwan Yuni Antara
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
13.	Nama	Wisynu Adhi Nuswandityo
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi

	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
14.	Nama	C. Ste Aryati
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
15.	Nama	Petrus Santoso
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
16.	Nama	Budi Hardjanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
17.	Nama	B. Tatiek Suryanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain

18.	Nama	Irene Wahyuningrum
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain
19.	Nama	Paulus Arry Mardiyanto
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Direksi
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham lain

### 10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

#### Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Suitberbus Fajar Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi lain
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Johannes Bosco Herimahadi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi lain
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
3.	Nama	Laurentia Dyah Widia
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi

Direksi Lain di BPR	lain
Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham

#### Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Octavianus Sunyi Haryanto
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Pemegang Saham
2.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Christophorus Rinal Pudyantoro

#### Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

1.	Nama	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris lain
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Christophorus Rinal Pudyantoro
2.	Nama	Hery Wiratno P
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan	Adik kandung Naning Poedyaningsih dan

	Pemegang Saham Lain di BPR	Paman Wisynu Adhi Nuswandityo
3.	Nama	Naning Poedyaningsih
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Ibu kandung Wisynu Adhi Nuswandityo dan Kakak kandung Hery Wiratno
4.	Nama	Mateus Nugraha
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Adik kandung C. Ste Aryati dan Petrus Santoso
5.	Nama	Petrus Santoso
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Direksi
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Kakak kandung Mateus Nugraha dan Adik kandung C. Ste Aryati

## 11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

### 1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	3 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp1.290.240.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp426.000.000

### 1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	3 orang
-----------------------------------	---------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	<b>Rp105.800.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	<b>Rp35.500.000</b>

### 1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	<b>Rp238.093.459</b>
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	<b>Rp119.046.729</b>

### 1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	<b>Rp6.495.000</b>
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	<b>0 orang</b>

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>
--	------------

### 2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	<b>Rp0</b>
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	<b>0 orang</b>
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	<b>Rp0</b>

### 2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>3 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	<b>Rp3.798.200</b>
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	<b>2 orang</b>
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	<b>Rp3.190.400</b>

#### 2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

### 12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

#### 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	4,81 : 1
-------------	----------

#### 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,30 : 1
-------------	----------

#### 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,22 : 1
-------------	----------

#### 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	2,05 : 1
-------------	----------

#### 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	3,33 : 1
-------------	----------

### 13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	14 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
<b>Topik/Materi Pembahasan:</b>		
1. Wacana Penghapusan bujukan kalau akan dilaksanakan, dipastikan prosedur		

- prosedurnya sudah benar dan sudah dilakukan upaya yang maksimal.
2. Perlu direview angka Nett Interest Margin (NIM), dari kisaran angka 7,1% – 7,6%, karena mengakibatkan pendapatan yang minim. Perubahan2 bunga LPS perlu diikuti dengan perubahan bunga kredit.
  3. MOU kredit Pegawai agar lebih memperhatikan risiko dan mitigasinya.
  4. Sistem dan secara manual harus sejalan sehingga perlu rekonsiliasi kesamaan keduanya.
  5. Untuk pencapaian target, strategi yang diperlukan harus ditambah effort lebih dari biasanya.

2.	Tanggal Rapat	08 Juli 2025
----	---------------	--------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Terlaksananya SOP harus dipastikan dipahami dan dimengerti oleh bagian, baik itu oleh maker, cheker maupun user
2. Evaluasi suku bunga perlu memperhatikan setiap perubahan suku bunga LPS
3. Kekosongan di bagian audit untuk diisi oleh personil yang tidak sungkan dan independen
4. Permasalahan dengan pihak CBS untuk selalu dipantau progres penyelesaiannya
5. Di bagian SDM perlu diperhatikan adanya layer layer penggantian, mengingat adanya pengalihan tugas- tugas dan tanggung jawab per orangan (misal cuti), pendelegasian, jangan sampai mengganggu operasional dan didukung dengan pengadministrasian yang lengkap
6. Perlu pembelajaran pada semua karyawan dengan cara merotasi dengan maksud tour of duty
7. Penempatan - penempatan di bank lain dipantau jatuh temponya, juga dilakukan test case dengan cara pencairan

3.	Tanggal Rapat	12 September 2025
----	---------------	-------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. AO yang kurang mencapai target, dikumpulkandan diajari bagaimana memasarkan produk - produk. Disarankan akan potensi yang ada supaya kerja dengan efektif
2. Buat terobosan - terobosan untuk menambah OSC, agar pendapatan bunga secara organik kredit tumbuh. Explore nasabah - nasabah existing supaya mendapatkan rekomendasi nasabah yang bisa jadi pegangan
3. Pelaksanaan pelatihan harus diselaraskan antara goal/ tujuan dengan refreshingnya. Pelatihan APU PPT & PPPSPM dilaksanakan sesuai agenda
4. Akhir tahun tinggal 4 bulan, segala permasalahan agar segera dicarikan solusinya supaya semua target RBB akhir tahun bisa tercapai

4.	Tanggal Rapat	11 November 2025
----	---------------	------------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

**Topik/Materi Pembahasan:**

1. Penanganan kredit bermasalah, terutama kredit dengan nominal dibawah 5 jt, untuk

- selalu melaporkan perkembangannya. Sementara untuk kredit perlu inovasi di perusahaan2 swasta, juga dengan pegawai - pegawainya untuk menambah NOA dengan tidak mengesampingkan mitigasi risikonya
2. Buat terobosan - terobosan dan kreativitas karyawan Dana, untuk menggaet nasabah - nasabah dengan pasar terdekat, nasabah - nasabah BCA dan Mandiri. Diharapkan semua produk dana ada pertumbuhan NOA
  3. Jaminan benda bergerak terutama kendaraan penanganannya harus disiplin, lakukan koordinasi antara bisnis dan operasional, demikian juga dengan penghapus bukaan.
  4. Upayakan peningkatan NIM, kalau bisa mendekati nilai 10
  5. Sistem pengawasan berjenjang digunakan sebagai alat control supaya bisa mengantisipasi adanya peluang fraud. Bisa juga dengan melakukan sampling. Fungsikan maker dan cheker sebagai dual control dalam upaya penertiban dan disiplin administrasi
  6. Manfaatkan biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi karyawan.

#### 14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

##### Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Octavianus Sunyi Haryanto</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>4 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	<b>Nicolaus Ndaru Sunarwibowo</b>
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	<b>4 kali hadir</b>
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	<b>0 kali hadir</b>

#### 15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

##### 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<b>0 kasus</b>

Pada Tahun Laporan	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

### 1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	<b>0 kasus</b>

Pada Tahun Laporan	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

#### 1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	<b>0 kasus</b>
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	<b>0 kasus</b>

Tidak ada Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

## 16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

### 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>3 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	<b>0 kasus</b>

### 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>10 kasus</b>
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	<b>0 kasus</b>

Proses permohonan eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri

### 17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

### 18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

#### Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	<b>11 Agustus 2025</b>
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	<b>01. Kegiatan Sosial</b>
	Penerima Dana	<b>Panitia HUT RI ke 80 Bogem</b>
	Penjelasan Kegiatan	<b>Kegiatan HUT RI ke 80 Bogem</b>
	Jumlah (Rp)	<b>Rp500.000</b>
2.	Tanggal Pelaksanaan	<b>15 Agustus 2025</b>
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	<b>01. Kegiatan Sosial</b>
	Penerima Dana	<b>Panitia hari Kesetiakawanan Bogem</b>
	Penjelasan Kegiatan	<b>Bakti sosial hari Kesetiakawanan</b>
	Jumlah (Rp)	<b>Rp300.000</b>
3.	Tanggal Pelaksanaan	<b>11 Desember 2025</b>
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	<b>01. Kegiatan Sosial</b>
	Penerima Dana	<b>Perbarindo</b>
	Penjelasan Kegiatan	<b>Donasi peduli bencana Sumatra</b>
	Jumlah (Rp)	<b>Rp5.000.000</b>

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR SHINTA DAYA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 15 April 2026

**PT BPR SHINTA DAYA**

Disiapkan oleh



Johan Iskandar

PE Kepatuhan & Manajemen Risiko

Disetujui oleh



Suitbertus Fajar Nugraha

Direktur Utama

Disetujui oleh



Octavianus Sunyi Haryanto

Komisaris Utama